

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aatje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta : Raih Sukses, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2006.

Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung : Mandar Maju, 2010.

Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1999.

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Locket Pelayanan Pertanahan.

